

LAPORAN REVIEW SOP TAHUN 2019



**PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PANGKALPINANG
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmat-nya Laporan Review SOP ini dapat diselesaikan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pembangunan gerakan reformasi birokrasi, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi terselenggaranya *good government*.

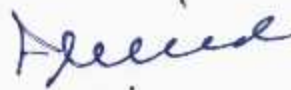
Laporan Review SOP secara berkala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini cukup penting dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai percepatan waktu pelayanan serta efisiensi dan efektivitas SOP yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan review SOP waktu layanan seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang review waktu pelayanan publik yang ada.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik Struktural maupun fungsionalnya, maka pelayanan publik yang ada dapat terlaksana dengan baik. Semoga layanan publik yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terlaksana lebih baik lagi dan tepat sasaran sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan *stakeholders*.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Pangkalpinang, Maret 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



 **EKO KURNIAWAN, S.Sos, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 197009261997031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	3
BAB II PEMBAHASAN.....	5
BAB III PENUTUP.....	6
3.1 Kesimpulan.....	6
3.2 Saran.....	6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan *good governance* (pemerintahan yang baik) diperlukan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, program-program pembangunan masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat. Sehingga perlu untuk menetapkan peta proses bisnis dan SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan untuk Pelayanan Publik.

Pengertian SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP merupakan standar yang dijadikan acuan dalam proses penyelesaian setiap judul kegiatan dalam organisasi. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan SOP merupakan suatu keharusan dan perlu dilakukan evaluasi minimal satu tahun sekali untuk perbaikan.

Pelaksanaan review SOP harus dilakukan secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setiap upaya review SOP akan menjadi bahan yang berharga dalam percepatan dan evaluasi sehingga penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan. Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang

tercantum dalam Standar Pelayanan Publik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan ke pada Provinsi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Dengan diformulasikannya tugas dan fungsi ini maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut :

- 1. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.*
- 2. MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSINERGI DAN TERINTEGRASI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.*

Untuk itu, sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melakukan review SOP secara berkala.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukan review SOP adalah :

1. Melakukan perbaikan layanan publik kepada pengguna;
2. Mempercepat pelayanan publik kepada pengguna;
3. Memudahkan pengguna dalam mengakses pelayanan publik yang ada;
4. Menghasilkan inovasi baru untuk kepuasan pelayanan kepada pengguna;
5. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas;
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

7. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
8. Menciptakan ukuran standar kinerja untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
9. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
10. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;
11. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

BAB II

PEMBAHASAN

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan Review secara berkala yang ada untuk 8 (delapan) area perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Review SOP (terlampir).

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Review SOP diharapkan dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam hal pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diantaranya dengan mempersingkat waktu layanan, sehingga pengguna menjadi lebih memahami perbedaan jangka waktu penyelesaian pelayanan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan.

Pembagian 2 prosedur layanan bagi 2 pengguna yang berbeda akan membantu pelaksanaan layanan serta pengguna juga akan lebih memahami persyaratan dan prosedur apa yang harus dipenuhi untuk menggunakan layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari hasil review SOP ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih efisien dan efektif sehingga mempermudah pengguna dalam memanfaatkan layanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.2 Saran

Review SOP untuk pelayanan publik di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dilakukan secara berkala sebulan sekali untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.